KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 1 1 2 6

H.2 [X] Pembetulan Ke- 0 H.3 [ ] Pembatalan

H.4 [X] Final

H.5 [ ] Tidak Final

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A.1 NPWP : 73 331 301 9 722 000

A.2 NIK :

A.3 Nama : NUSIANA BUMBUNGAN

B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG

MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER-NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
3	21-402-01	541.700	541.700	0	5	27.085

Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota

B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 026/SP2D-GU/BLUD-RSJDAHM/III/2022

Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 16 *dd* 03 *mm* 2022 *yyyy*

B.9 [ ] PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.

Nomor : Tanggal *dd* *mm* *yyyy*

B.10 [ ] PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11 [ ] PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 95 335 016 2 722 000

C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

C.3 ID Subunit Organisasi :

C.4 Tanggal : 16 *dd* 03 *mm* 2022 *yyyy*

C.5 Nama Penandatangan : HARI JUMADI

C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan.

LPD4FV8U